

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tantangan yang dihadapi oleh perekonomian suatu negara mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran termasuk inflasi dan tingkat upah. Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga-harga barang dan jasa, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Sebaliknya, tingkat upah mencerminkan penghargaan yang diterima oleh pekerja sebagai ganti usaha dan kontribusi mereka dalam proses produksi.

Pengangguran merupakan permasalahan yang kerap dihadapi di setiap wilayah. Tingkat pengangguran menjadi salah satu parameter untuk mengevaluasi kemajuan suatu daerah, karena semakin tingginya tingkat pengangguran mengindikasikan memburuknya kondisi perekonomian. Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah inflasi, yang mencerminkan kenaikan harga-harga secara keseluruhan. Setiap tahun, peningkatan tingkat inflasi akan memperburuk tingkat pengangguran dan berpotensi mengurangi taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upah minimum juga memengaruhi tingkat pengangguran, karena menetapkan standar upah bagi pekerja di lingkungan kerja mereka, yang kemudian dijadikan acuan oleh pemberi kerja untuk membayar sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan.

Permasalahan pengangguran merupakan masalah kompleks yang melibatkan beberapa indikator lainnya, seperti inflasi dan tingkat upah di suatu daerah. Kenaikan tingkat inflasi diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan peluang kerja baru. Begitu pula dengan kenaikan tingkat upah di suatu daerah, diharapkan dapat berdampak positif dengan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Keterkaitan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian ekonom pada akhir tahun 1950-an ketika A.W. Phillips, melalui karyanya yang berjudul "The Relationship Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rate in the United Kingdom", yang dipublikasikan dalam jurnal *Economica*, menunjukkan hubungan negatif antara peningkatan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Penelitian Phillips menggunakan data perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran di Inggris dari tahun 1861 hingga 1913, dan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi yang tercermin dalam peningkatan tingkat upah dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi menyebabkan penurunan tingkat upah (upah menjadi lebih rendah).

Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga tidak selalu bisa dicapai secara bersamaan. Jika pemerintah menginginkan stabilitas harga, mereka harus siap menerima tingkat pengangguran yang tinggi. Sebaliknya, jika pemerintah berupaya menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, maka tingkat inflasi cenderung meningkat. Kedua pilihan tersebut tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun, tujuan setiap negara adalah mencapai tingkat inflasi dan pengangguran yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Upah minimum juga memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat pengangguran. Penetapan upah minimum oleh pemerintah memengaruhi tingkat pengangguran, karena tidak semua perusahaan mampu membayar upah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya, beberapa perusahaan mungkin harus mengurangi jumlah pekerja mereka agar bisa mematuhi aturan upah minimum, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran.

Manfaat dari menetapkan upah bisa dilihat dari perspektif penawaran tenaga kerja, di mana peningkatan tingkat upah akan mendorong peningkatan penawaran tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun, dampak negatifnya terlihat dari sudut pandang permintaan, di mana peningkatan besar dalam penetapan upah oleh pemerintah dapat mengakibatkan penurunan jumlah pekerja yang direkrut di wilayah tersebut.

Kota Medan dan Sibolga merupakan dua kota besar di Provinsi Sumatera Utara, dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dan pusat perekonomian serta perdagangan, sementara Sibolga merupakan kota pelabuhan penting. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Kota Medan dan Sibolga pada tahun 2023 masing-masing sebesar 8,67% dan 6,79%. Kedua kota tersebut masih memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,32%.

Tabel 1.1
Tingkat Inflasi, Tingkat Upah dan Pengangguran di Kota Medan Tahun 2017-2022

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Upah (Rp)	Tingkat Pengangguran (%)
2017	3,18	Rp. 2.528.815	9,46
2018	1,00	Rp. 2.749.074	8,25
2019	2,43	Rp. 2.969.825	8,53
2020	1,76	Rp. 3.222.557	10,74
2021	1,70	Rp. 3.329.867	10,81
2022	6,10	Rp. 3.370.645	8,89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa tingkat inflasi, tingkat upah, dan tingkat pengangguran di Kota Medan mengalami fluktuasi. Pada rentang tahun 2017 hingga 2022, tingkat inflasi meningkat dari 3,18% menjadi 6,10%, sementara tingkat upah cenderung naik dari Rp. 2.528.815 menjadi Rp. 3.370.645. Di sisi lain, tingkat pengangguran menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021, mencapai 10,81%.

Kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2021 disebabkan oleh efek yang berkelanjutan dari pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan pada perekonomian masyarakat dan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan karyawan. Fluktuasi tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil sepenuhnya menangani masalah pengangguran, terutama di Kota Medan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya diikuti dengan

penurunan tingkat pengangguran setiap tahunnya, namun hal ini belum terjadi secara konsisten di Kota Medan.

Tabel 1.2
Tingkat Inflasi, Tingkat Upah dan Pengangguran di Kota Sibolga Tahun 2017-2022

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Upah (Rp)	Tingkat Pengangguran (%)
2017	3,08	RP. 2.357.247	9,29
2018	2,86	Rp. 2.562.563	8,61
2019	2,58	Rp. 2.768.337	7,40
2020	2,42	Rp. 3.004.000	8,00
2021	1,86	Rp. 3.004.000	8,72
2022	6,43	Rp. 3.006.826	7,05

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel untuk Kota Sibolga, terlihat bahwa data tingkat inflasi, tingkat upah, dan tingkat pengangguran mengalami fluktuasi. Pada periode 2017 hingga 2022, tingkat inflasi meningkat dari 3,08% menjadi 6,43%, sementara tingkat upah cenderung naik setiap tahunnya, dari Rp. 2.357.247 menjadi Rp. 3.006.826. Tingkat pengangguran juga mengalami perubahan yang bervariasi, dengan mengalami penurunan dari 9,29% pada tahun 2017 menjadi 7,05% pada tahun 2022.

Perubahan yang tidak stabil dalam tingkat inflasi di Kota Sibolga, bersamaan dengan tingkat upah minimum yang rendah, merupakan masalah bagi para pekerja. Di sisi lain, tingkat upah minimum yang tinggi menjadi tantangan bagi pengusaha dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor ekonomi yang diduga memiliki dampak pada tingkat pengangguran adalah inflasi dan tingkat upah. Inflasi adalah salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pengangguran, dimana inflasi mengacu pada peningkatan harga-harga dalam suatu ekonomi. Tingkat inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang-barang dalam periode waktu tertentu. Inflasi menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi, yang kemungkinan dapat mengurangi penggunaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja.

Variabel lain yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat upah. Upah adalah imbalan yang diterima oleh satu unit tenaga kerja dalam bentuk pembayaran uang. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, semakin besar kemungkinan akan terjadi penurunan jumlah pekerja yang direkrut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Soeharjoto & Oktavia (2021), telah dijelaskan bahwa inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian lain oleh Silaban & rekan (2020) menemukan bahwa secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama periode 2003-2019. Namun, menurut penelitian Sembiring & Sasongko (2019), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan upah minimum memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia selama periode 2011-2017.

Sebaliknya, penelitian oleh Angga & Fikriah (2020) menyimpulkan bahwa UMP memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Aceh, sementara IPM tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan berbagai tantangan yang terkait dengan masalah pengangguran dan fenomena ekonomi yang terjadi di dalamnya, penulis tertarik untuk mengeksplorasi sejauh mana hubungan antara pengangguran, inflasi, dan tingkat upah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "**Dampak Inflasi dan Tingkat Upah Terhadap Pengangguran (Studi Kasus: Kota Medan dan Sibolga)**".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Salah satu cara untuk memahami inflasi adalah akibat dari meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas dan kurangnya produksi. Tetapi, peningkatan biaya produksi dalam suatu usaha juga bisa mengakibatkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya bisa menyebabkan inflasi.
2. Kenaikan upah minimum memiliki dampak yang berlawanan. Peningkatan upah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya beli masyarakat, yang kemudian dapat mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa, menyebabkan laju inflasi meningkat.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Penulis percaya bahwa untuk melakukan penelitian ini dengan cara yang lebih tepat, menyeluruh, dan fokus, variabel-variabel yang digunakan para peneliti untuk mengatasi kekhawatiran mereka harus dibatasi hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat gaji sehubungan dengan pengangguran di kota-kota

besar Medan dan Sibolga. Variabel inflasi dan tingkat upah dipilih karena memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Medan dan Sibolga.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul di atas, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat upah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan dan Sibolga?
2. Bagaimana dampak inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan dan Sibolga?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai apakah tingkat upah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan dan Sibolga.
2. Untuk mengevaluasi dampak inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan dan Sibolga.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi peneliti serta pihak terkait dengan masalah yang diteliti. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi mereka yang memerlukan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan menjadi bahan untuk memperluas dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bagi akademisi, penelitian ini tentang inflasi, tingkat upah, dan pengangguran di Kota Medan dan Sibolga dapat menyajikan konsep dan informasi baru yang bermanfaat bagi para akademisi dalam bidang tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2012), pengangguran dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang termasuk dalam angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ini mengindikasikan bahwa pengangguran adalah kondisi di mana individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya.

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa pengangguran mengacu pada individu yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum bekerja, mungkin karena ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Untuk mengevaluasi tingkat pengangguran dalam suatu negara, tidak hanya jumlah pengangguran secara absolut yang diperhatikan, tetapi juga tingkat penganggurannya. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Rumus untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah:

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka (persentase)

PP : Jumlah Pengangguran (orang)

PAK : Jumlah Angkatan Kerja (orang)

2.1.1 Jenis-jenis Pengangguran

1. Pengangguran, menurut pengertian, dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Pengangguran Terbuka (Open Unemployment)

Pengangguran terbuka merujuk pada individu yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Keadaan ini bisa disebabkan oleh usaha maksimal untuk mencari pekerjaan namun belum berhasil, atau juga bisa disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk bekerja.

b) Pengangguran Terselubung

Pengangguran terselubung terjadi ketika terdapat lebih banyak tenaga kerja yang tersedia untuk satu pekerjaan tertentu daripada yang diperlukan. Hal ini bisa juga terjadi karena individu yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuan atau bakatnya, sehingga kinerjanya tidak optimal.

c) Setengah Menganggur

Setengah menganggur terjadi ketika terdapat periode pengangguran yang panjang, dan angkatan kerja yang terkena dampaknya memiliki kinerja di bawah standar. Dari sudut pandang lain, setengah pengangguran didefinisikan sebagai bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau kurang dari 7 jam per hari.

2. Pengangguran Menurut Penyebab. Menurut Iskandar Putong, pengangguran dapat dibagi menjadi tiga jenis:

a) Pengangguran Siklis

Pengangguran siklis terjadi ketika permintaan ekonomi tidak mencapai level yang seharusnya, menyebabkan terjadinya pengangguran. Fenomena ini dikenal sebagai pengangguran siklis.

b) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional merujuk pada pengangguran yang timbul akibat perubahan dalam sifat pekerjaan dan lapangan kerja. Hal ini dikenal sebagai pengangguran friksional.

c) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ketidakcocokan antara keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Keadaan ini disebut pengangguran struktural.

2.1.2 Dampak Pengangguran

- a) Dari perspektif ekonomi, pengangguran akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan karena banyaknya orang yang tidak bekerja akan berdampak negatif pada pendapatan mereka, terutama dengan terus meningkatnya biaya hidup.
- b) Dari sudut pandang masyarakat, tingkat pengangguran yang tinggi akan berkontribusi terhadap kemiskinan dan peningkatan jumlah pengemis dan pengamen, yang mungkin berdampak pada tingkat kejahatan karena banyak orang melakukan kejahatan ketika mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan.
- c) Dari segi psikologis, banyaknya pengangguran akan menyebabkan rendahnya harga diri, putus asa, dan depresi.
- d) Dari sudut pandang politik, akan banyak terjadi protes yang akan menggoyahkan lanskap politik. Serikat pekerja akan banyak melakukan protes karena hal ini.

2.2 Inflasi

Kurva Phillips menunjukkan bahwa tingkat inflasi menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pengangguran, menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, para ekonom berpendapat bahwa harapan inflasi memungkinkan penyesuaian penuh terhadap tingkat inflasi saat ini, sehingga Kurva Phillips dalam jangka panjang menjadi vertikal (Feriyanto, 2014), menunjukkan hubungan yang positif antara inflasi dan pengangguran.

Inflasi adalah peningkatan harga-harga secara menyeluruh yang disebabkan oleh jumlah uang yang beredar berlebihan (Sukirno, 2012). Proses terus menerus naiknya harga barang dan jasa disebut sebagai inflasi (Feriyanto, 2014). Dengan demikian, inflasi dapat dijelaskan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan yang bisa disebabkan oleh peningkatan peredaran uang, depresiasi mata uang, kenaikan upah, atau pengaruh inflasi dari luar negeri. Berikut adalah rumus untuk menghitung tingkat inflasi.:

$$LI = \frac{(IHK + IHK_{t-1})}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

LI : Laju Inflasi

IHK : Indeks Harga Konsumen

T : Tahun Saat Ini

t-1 : Tahun Sebelumnya

1) Teori Keynes

Menurut pandangan Keynes, inflasi terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat menjadi konsumtif atau menginginkan gaya hidup di luar kemampuan ekonominya, yang menyebabkan mereka membeli barang dan jasa secara berlebihan. Jika penawaran tetap dan permintaan meningkat, maka harga-harga akan naik.

2) Teori Kuantitas

Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher mengasumsikan bahwa inflasi timbul karena adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Teori klasik Irving Fisher berpendapat bahwa nilai V dan T tetap, yang dapat dijelaskan dengan rumus persamaan:

$$MV = PT$$

Keterangan:

M : Jumlah uang beredar

V : Kecepatan peredaran uang

T : Jumlah barang dan jasa

Dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam penawaran uang dapat mengakibatkan perubahan sebanding dengan perubahan tingkat harga (Sukirno, 2012). Oleh karena itu, ahli ekonom klasik berpendapat bahwa ekspansi moneter (peningkatan penawaran uang) dapat menyebabkan inflasi.

3) Teori Struktural

Dalam teori struktural dijelaskan bahwa inflasi terjadi karena adanya peningkatan permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak dapat diantisipasi oleh produsen, terutama akibat pertumbuhan populasi.

2.3 Tingkat Upah (UMK)

Menurut Feriyanto (2014), upah adalah pendapatan yang diterima oleh pekerja atau tenaga kerja sebagai imbalan atas jasanya kepada perusahaan. Upah ini merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai hasil dari usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan. Upah bisa berupa sejumlah uang yang langsung dibayarkan kepada pekerja sebagai imbalan atas waktu dan tenaga yang mereka sumbangkan dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Upah juga bisa meliputi berbagai bentuk tunjangan atau manfaat lainnya, tergantung pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang berlaku. Dengan demikian, upah merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh oleh pekerja sebagai hasil dari usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan dalam suatu hubungan kerja.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah menetapkan standar upah minimum yang berlaku di berbagai wilayah. Upah minimum ini adalah jumlah upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah bekerja kurang dari satu tahun. Upah minimum mencakup upah pokok dan juga tunjangan tetap lainnya. Proses penetapan upah minimum melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ekonomi, tingkat inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan untuk membayar upah yang layak. Pemerintah berupaya

keras untuk memastikan bahwa kenaikan upah minimum tidak berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran yang sudah tinggi.

Menurut Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2005 dan revisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2012, terdapat 5 faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum, yaitu:

- a. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- b. Produktivitas makro
- c. Pertumbuhan ekonomi
- d. Kondisi pasar kerja
- e. Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal)

Berikut adalah rumus untuk menghitung upah minimum:

$$UM_n = U_{m_t} + \{U_{m_t} \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan

U_{m_t} : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi

PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dari kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 mengenai perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran di Inggris antara tahun 1861 hingga 1957, dia menemukan sebuah korelasi yang menarik. Phillips menemukan bahwa ada hubungan negatif antara kenaikan upah dan tingkat pengangguran. Artinya, ketika tingkat kenaikan upah meningkat, tingkat pengangguran cenderung turun, dan

sebaliknya. Temuan ini kemudian dikenal sebagai Kurva Phillips. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan ini mungkin tidak selalu berlaku secara universal dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial lainnya.

Pada dasarnya, peningkatan upah minimum dapat memiliki dua dampak utama terhadap tingkat pengangguran:

1. Efek Substitusi: Ketika upah minimum naik, pekerja mungkin lebih mahal untuk dipekerjakan. Ini dapat mendorong pengusaha untuk mengurangi jumlah pekerja yang mereka gunakan, khususnya dalam industri atau sektor yang memiliki kemampuan untuk mengganti pekerja manusia dengan teknologi atau proses otomatisasi. Akibatnya, ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran.

2. Efek Pendapatan: Peningkatan upah minimum juga dapat meningkatkan daya beli pekerja. Saat pekerja memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, Mereka memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan lebih banyak uang, yang bisa meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor-sektor yang menyediakan barang dan jasa yang diminta tersebut.

Keseimbangan antara dua efek ini sering kali kompleks dan bergantung pada banyak faktor, termasuk struktur industri, keadaan pasar tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan trade-off antara meningkatkan upah dan mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya adalah hasil dari riset yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Untuk memudahkan pekerjaan peneliti, penelitian sebelumnya

dikonsultasikan atau digunakan sebagai landasan untuk studi baru. Penelitian dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor, antara lain subjek penelitian, tahun pengumpulan data, dan permasalahan yang dihadapi bidang penelitian. Tabel 2.1 menampilkan studi sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nabila- Nonirozaini (2022)	Pengaruh Inflasi dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Padang Sidempuan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan uang beredar dan tingkat suku bunga Bank Indonesia memiliki dampak yang sangat besar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Peningkatan yang berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dapat menyebabkan terlalu banyaknya uang beredar.
2	Fikri-Allanis (2023)	Pengaruh upah pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia	Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, baik dalam arah yang positif maupun

			negatif.
3	Dewi Indriani (2019)	Pengaruh upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, dan secara terpisah, upah minimum juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran.
4	Nursyafina (2020)	Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang menandakan bahwa ketika tingkat inflasi meningkat, tingkat pengangguran juga cenderung meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat,

			tingkat pengangguran juga cenderung meningkat.
5	Anwar	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai koefisien sebesar 0.427, namun memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa. Sedangkan variabel tingkat upah memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai koefisien sebesar 0.000, dan juga memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Gowa.
6	Sri Yuni Bintang- Riandani Rezki Prana (2020)	Pengaruh Inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan	Hasil dari penelitian ini, yang dilakukan oleh Sri Yuni Bintang- Riandani Rezki Prana pada tahun 2020, menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki kemampuan untuk menjelaskan sebagian variasi yang terjadi pada tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan. Hal ini

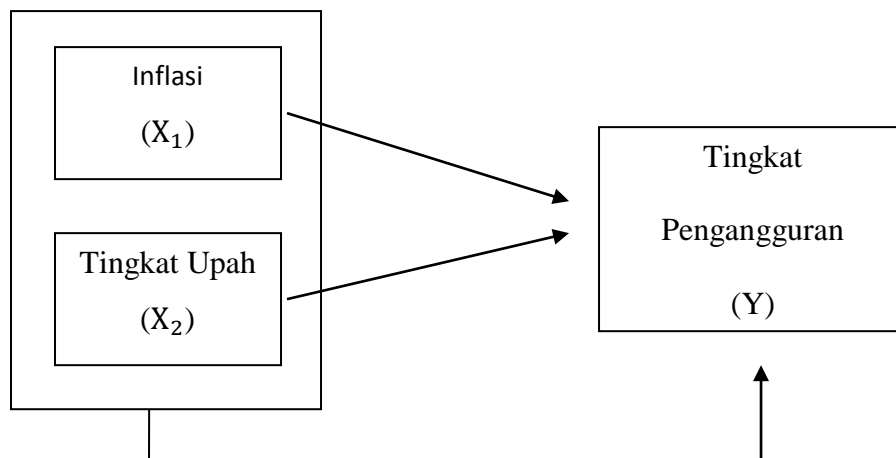
			<p>terbukti dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.020 atau 2%. Namun, sebagian besar variasi lainnya, sebesar 98%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diselidiki dalam penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, upah minimum, tingkat pendidikan, serta faktor lain yang memengaruhi.</p>
--	--	--	--

Sumber : Data diolah

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa tingkat upah memiliki dampak pada tingkat pengangguran. Peningkatan upah menghasilkan dua efek yang saling bertentangan terhadap penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi mendorong setiap pekerja untuk bekerja lebih lama karena upah per jam yang diterima lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan menghasilkan dampak sebaliknya, di mana upah yang lebih tinggi mendorong pekerja untuk menikmati lebih banyak waktu rekreasi dan membeli lebih banyak barang konsumsi.

Untuk mempermudah penelitian dan mengklarifikasi dasar pemikiran, sebuah kerangka pemikiran skematis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan dan Sibolga.
2. Diduga bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek di Kota Medan dan Sibolga.